

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu karakter kuat masyarakat kontemporer adalah bekerjanya teknologi sebagai struktur sama seperti sistem hukum, ekonomi, maupun politik, teknologi memainkan peran signifikan dalam menjaga keberlangsungan tatanan sosial (sosial order). Teknologi adalah salah satu elemen sosial ekonomi yang memainkan peranan penting dalam proses modernisasi masyarakat barat.¹ Ketika gagasan modernitas mengalir ke masyarakat Dunia Ketiga, teknologi menjadi prasyarat fundamental demi terwujudnya sistem sosial ekonomi modern di masyarakat tersebut. Oleh karena itu, berbagai upaya modernisasi masyarakat Dunia Ketiga mengikut sertakan program transfer teknologi dalam agenda utama. Program ini bekerja atas dasar suatu asumsi bahwa teknologi bersifat netral dan bebas konteks; bahwa teknologi dapat bekerja melintasi batas-batas sosial, politik, dan kultural sehingga bersifat universal.² Jika suatu teknologi dapat bekerja dengan baik di masyarakat barat, maka diapun akan bekerja dengan baik dimasyarakat manapun dimuka bumi ini.

Selama puluhan tahun, gagasan transfer teknologi diterima tanpa sikap kritis oleh masyarakat Dunia Ketiga sebagai suatu keharusan dalam mencapai modernitas yang diinginkan. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan teknologi di Dunia Ketiga tidak tercapai secara optimal. Implikasi program transfer teknologi bahkan

Ketika penemuan teknologi informasi berkembang dalam skala massal, maka teknologi itu telah merubah bentuk masyarakat, dari masyarakat dunia lokal menjadi masyarakat dunia global. Sebuah dunia yang sangat transparan terhadap perkembangan informasi, transportasi serta teknologi yang begitu cepat dan begitu besar mempengaruhi peradaban umat manusia, sehingga dunia dijuluki sebagai *the big village*, yaitu sebuah desa yang besar, dimana masyarakatnya saling kenal dan saling menyapa satu dengan yang lainnya. Masyarakat global itu juga dimaksud sebagai sebuah kehidupan yang memungkinkan komunitas manusia menghasilkan budaya-budaya bersama, menghasilkan produk-produk industri bersama, menciptakan pasar bersama, memelihara keamanan bersama, menciptakan mata uang bersama, melakukan pertahanan militer bersama dan menciptakan peperangan dalam skala global di semua lini. Secara nyata perkembangan teknologi telah mampu menciptakan dunia global yang berkembang tanpa batas negara dan batas bangsa. Dunia teritorial dan dunia ruang telah menjadi sesuatu yang sangat tidak berarti. Bila kita ingin menggambarkan zaman ini, maka gambaran yang terbaik untuk dijelaskan mengenai suatu realitas masyarakat, adalah masyarakat dengan sistem teknologi yang baik atau masyarakat teknologi. Untuk mencapai masyarakat teknologi, maka suatu masyarakat harus memiliki sistem teknologi yang baik. Karenanya fungsi teknologi adalah kunci utama perubahan di masyarakat.

Teknologi secara fungsional telah menguasai masyarakat, bahkan pada fungsi yang substansial, seperti beberapa sistem norma di masyarakat, umpamanya: sistem lalu lintas di jalan raya, sistem komunikasi, seni pertunjukkan dan sebagainya. Didalam dunia media informasi, sistem teknologi juga telah menguasai jalan pikiran masyarakat, seperti yang telah diistilahkan dengan *theater of mind*.³ Bahwa siaran-siaran media informasi secara tidak sengaja telah meninggalkan kesan siaran didalam pikiran pemirsanya . andai

³ Burhan Bungin, *Pornomedia-Konstruksi Sosial dan Telematika & Perayaan seks di Media*

pun suatu saat media informasi itu dimatikan, kesan itu akan selalu hidup dalam pikiran pemirsa dan membentuk panggung-panggung realitas di dalam pikiran mereka. Perkembangan Teknologi berdampak pada teknologi informasi yang membuat media massa menjadi sebuah aspek sangat penting dalam kehidupan masyarakat modern, tidak saja mendorong perkembangan sebuah lingkungan yang strategis dan memasuki wilayah global.

Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan, pembangunan industri dan perdagangan di Indonesia dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu persaingan yang semakin tajam. Dengan adanya Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), liberalisasi perdagangan dalam APEC pada tahun 2010 untuk Negara maju dan tahun 2020 untuk Negara berkembang, dan skema CEPT dalam rangka AFTA-ASEAN pada tahun 2003⁴, maka gerak perdagangan dunia akan semakin dinamis dan cepat. Sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tariff dan perdagangan (GATT) pada tanggal 15 April 1994 di Marrakesh-Maroko⁵, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya melalui Undang-undang No. 7 tahun 1994 tentang Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)⁶.

Banyak yang setuju bahwa isu yang paling merugikan Negara-negara Selatan adalah TRIP's (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) dan TRIM's (Trade Related Investment Measures) dan perdagangan jasa. Negara-negara kuat itu menggunakan TRIP's dan TRIM's sebagai alat efektif untuk mencegah terjadinya alih-teknologi ke negara-negara miskin. Teknologi telah menjadi unsur strategis dalam upaya untuk memperoleh kendali atas pasar internasional. Karena itu, selalu akan ada

konflik antara yang memiliki teknologi maju dengan yang tidak memilikinya. Dalam pengertian ini TRIP's berperan sebagai penjamin bahwa teknologi akan menjadi barang mewah yang hanya yang hanya bias dinikmati oleh negara-negara kuat. Karena itu tidak mengherankan kalau negara-negara industri maju menggunakan TRIP's sebagai alat "*nasionalisme teknologi*"⁷ untuk menjamin proteksionisme teknologi. Sudah jelas, bahwa kalau negara-negara miskin tidak boleh menikmati penggunaan teknologi maju itu mereka akan tertinggal jauh di belakang dan akan terus berada dalam kemiskinan..⁸

Yang juga mengkhawatirkan dalam Putaran Uruguay adalah dimasukkannya system "*pembalasan-silang*" yang berasal dari pasal dalam Omnibus Trade and Competitiveness Act of 1988, yang disebut pasal "*Super 301*".⁹ Ini adalah system sanksi yang mengkaitkan semua bidang ekonomi. dalam aturan ini, kalau suatu negara melakukan pelanggaran dalam satu sector, misalnya melanggar TRIP's, ia akan bisa dibalas oleh lawannya dalam sector yang berbeda, misalnya perdagangan barang. Bahkan masalah hak azazi manusia. Penerapan mekanisme pemberian sanksi seperti ini akan membuat banyak negara miskin dalam posisi yang rentan. Kepentingan ekonomi dan perdagangan mereka akan selalu terancam untuk diganggu oleh sanksi-sanksi dari pihak luar.

Aktor yang justru sangat berkuasa dan justru lebih terpenting setelah WTO adalah Trans National Corporations (TNC's). merekalah yang sebenarnya berada dib alik semua proses kesepakatan dalam WTO. Merka adalah perusahaan-perusahaan transnasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme globalisasi system produksi, investasi dan pasar yang pengaturan mekanisme dari semua system produksi dan pasar tersebut ditetapkan di WTO. Dengan demikian, forum WTO pada hakikatnya

menjadi arena perjuangan bagi perusahaan transnasional untuk memepjuangkan cita-cita mereka dalam penguasaan dunia. Hal itu berarti bahwa segala yang melalui proses mekanisme globalisasi juga merupakan perbutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara-negara kepada TNC's.¹⁰

Jepang selama ini merupakan negara yang paling miskin dalam sumber daya alamnya di antara negara-negara industri. Kebanyakan sumber daya industrinya harus diimpor dari luar negeri. Selain minyak mentah, besi tua atau besi bahan, biji besi dan batu bara, Jepang harus juga mengimpor antimon, merkuri, mangan, timah, tungsten, molibden, dan krom dalam jumlah besar. Selain itu, nikel, kobalt, dan bauksit tidak ditambang di Jepang, serta mineral-mineral non logam yang harus diimpor dalam jumlah besar adalah borat, brom, magnesit, batu fosfat, agaram kalsium, dan nitrat. Serat-serat alam seperti katun, wool, flax, rami, da jute, juga sepenuhnya harus dipasok dari impor.

Perkembangan ekonomi Jepang telah mengharuskan pasokan bahan mentah dan sumber-sumber daya industrial dari luar negeri, khususnya dari Asia Tenggara, untuk industri-industrinya yang berorientasi kepada ekspor. Eknomi Jepang terutama didasarkan atas perdagangan dan penghentian pasokan beberapa sumber daya industri tertentu pasti akan melemparkan mekanisme industri kedalam kebingungan. Maka, tema utama dari para pengambil kebijakan Jepang telah terpusat pada pembelian pasokan bahan bahan mentah dalam jumlah yang cukup serta mempromosikan perdagangan luar negeri. Di masa lampau, sejumlah nasionalis ekstrem di Jepang dalam beberapa instansi telah mencoba mendapatkan pasokan bahan mentah dan pasar-pasar luar negeri dengan cara-cara militer. Selama Perang Dunia II, tujuan yang diakui dari "*Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya*" adalah mendapatkan bahan-bahan mentah industri strategis,

khususnya pasokan minyak dan bijih besi dari Cina dan Laut Selatan (Indonesia dan Malaysia, khususnya) dan pasar-pasar yang luar biasa besar di Asia.¹¹

Indonesia sangat penting di dalam kelangsungan kehidupan perekonomian Jepang, karena Indonesia adalah salah satu dari pemasok bahan baku bagi industri teknologi Jepang. Pasokan minyak dan gas cair Indonesia menjadi semakin penting bagi Jepang. Dalam tahun-tahun 81,82,83, ekspor bahan bakar mineral dari Indonesia ke Jepang masing-masing merupakan 89,89,87 dari total ekspor minyak Indonesia.¹² Dalam hal minyak cair dari negara-negara ASEAN, Indonesia mengeksport 31 persen dari seluruh total impor Jepang.¹³

Hubungan ekonomi-politik di Asia Timur (termasuk juga Asia Tenggara) dapat digambarkan bersifat hierarkis: ketergantungan teknologi, ketimpangan pembagian kerja, dan "backward integration". Secara de facto, wilayah ini (bahkan mungkin juga termasuk Cina) sebenarnya telah diintegrasikan kedalam suatu sistem ekonomi dimana Jepang berperan sebagai inti dan negara-negara lain sebagai periferinya. Wujudnya adalah suatu ekonomi yang secara struktural timpang, terutama dalam produksi dan distribusi kekayaan. Sebagai pihak yang dominan, Jepang menggambarkannya sebagai kondisi yang menguntungkan bagi seluruh kawasan Asia-Pasifik. Tetapi sebenarnya Jepang malah menghasilkan sub-ordinasi ekonomi negara-negara yang lebih lemah terhadap ekonomi Jepang. Salah satu mekanisme subordinasi itu adalah ketergantungan teknologi. Contohnya Indonesia, lebih berfungsi sebagai penyedia tempat bagi industri yang padat karya untuk merakit komponen-komponen yang diimpor terutama dari Jepang. Karena itu industrialisasi di Indonesia sangat tergantung pada teknologi dan kapital Jepang. Alih

¹¹ "The Japanese Economy" by Masahiko Machi, "The Japanese Economy" (1980), p. 10.

¹² "The Japanese Economy" by Masahiko Machi, "The Japanese Economy" (1980), p. 10.

¹³ "The Japanese Economy" by Masahiko Machi, "The Japanese Economy" (1980), p. 10.

yaitu kita hanya akan menerima teknologi yang sudah tidak ekonomis untuk diterapkan oleh industri Jepang.

Inilah yang memunculkan mekanisme kedua, yaitu "*pembagian kerja yang timpang*". Alih teknologi itu dilakukan untuk mengintegrasikan perusahaan-perusahaan di luar Jepang sebagai unsur-unsur subordinat dalam pembagian kerja regional yang dirancang demi keuntungan perusahaan-perusahaan Jepang sendiri. Dalam kerangka industri di Indonesia berfungsi mendukung industri di negeri Jepang.

Bersamaan dengan itu adalah mekanisme ketiga, "*backward integration*", yang memperketat kaitan ekonomi periferi dengan ekonomi negara inti. Di pertengahan 1980-an, perusahaan-perusahaan mobil dan barang konsumen elektronik Jepang merelokasi pabriknya ke wilayah Indonesia, lalu diikuti perpindahan perusahaan-perusahaan Jepang yang lebih kecil yang memasok kebutuhan suku cadang dan komponen bagi perusahaan-perusahaan mobil dan elektronik itu, dan terakhir Jepang merelokasi industri berat dan industri kimia yang memberi bahan dasar bagi perusahaan-perusahaan besar dan pemasoknya itu.

Ekspansi modal Jepang ke luar negeri mempunyai beberapa karakteristik. *Pertama*, modal Jepang yang dikembangkan berkaitan erat dengan strategi dunia, dan kebijaksanaan ke Asia mengikuti kebijaksanaan Amerika atau tergantung pada strategi Amerika. *Kedua*, modal negara Jepang ini pertama kali berbentuk pampasan perang dan kemudian kerjasama perekonomian. *Ketiga*, Sogo Shosha mempunyai kaitan yang erat dengan kapital negara Jepang dan ekspansi Indonesia ini membawa akibat pengguna modal Jepang secara maksimal. *Keempat*, modal Jepang kebanyakan diarahkan kepada negara sedang berkembang terutama di kawasan Asia. *Kelima*, ekspansi modal Jepang ke luar negeri dilakukan oleh perusahaan tingkat kecil hingga menengah dan diantaranya

... dalam Sogo Shosha. *Keenam*, pada

investasi bidang industri pertambangan merupakan peringkat utama untuk menjamin tersedianya bahan mentah bagi kepentingan dalam negeri Jepang.

Kebijaksanaan pemerintah untuk menarik modal luar negeri termasuk adalah dengan dikeluarkannya UU Penanaman Modal Asing tahun 1967. UU ini hampir merupakan kebalikan dari kebijaksanaan pemerintah terhadap investasi asing. Barangkali yang mungkin lebih penting UU itu merupakan simbol atau aba-aba bagi calon penanaman modal luar negeri dan dunia usaha prioritas ekonomi dan pembangunan. Apalagi dalam undang-undang tersebut diberikan banyak kemudahan bagi penanaman modal untuk mulai beroperasi. Semenjak diundangkannya undang-undang PMA (Penanaman Modal Asing) tahun 1967, Jepang memanfaatkan kesempatan ini dengan mendirikan 472 proyek yang sampai akhir tahun 1991 nilai keseluruhan investasinya berjumlah 11.405 juta dolar AS. Nilai ini merupakan nilai investasi yang terbesar di kawasan Asia, yaitu 265 dari total nilai keseluruhan investasinya. Dewasa ini terdapat sekitar 142 investor Jepang yang bekerja sama dengan Indonesia dengan total modal yang ditanam (asset) sekitar US \$2.242.4 juta, yang menyerap tenaga kerja 60.738 orang.

Indonesia yang memiliki kekayaan sumber alam dan bersamaan dengan keharusan politik memenuhi kebutuhan konsumsi barang pabrikan manufakturing dan melibatkan diri dalam perdagangan internasional. Memulai industrialisasi dengan menitikberatkan pada sektor substitusi impor terutama untuk memenuhi kebutuhan domestik. Sekurangnya hingga akhir dasawarsa 1960-an berada dalam tahapan substitusi impor terlihat kecendrungan bahwa mereka membatasi impor barang konsumsi untuk melindungi faktor industri substitusi impor dan pada saat yang sama meningkatkan impor barang-barang modal.

Kebijaksanaan industri substitusi impor ini tidak dikarenakan negara tersebut tidak tertarik pada investasi berorientasi impor, tetapi karena tingginya tingkat pengangguran dan promosi industri yang menggunakan tenaga kerja disamping itu investasi substitusi impor diterima sebagai tahap awal industrialisasi. Pada tahap ini aktifitas ekonomi dikonsentrasikan pada sektor primer dan kebanyakan barang manufaktur yang semua impor dibatasi dan ditentukan dengan jalan menggunakan tarif tinggi dan menajaga pasaran dalam negeri.

B. Pokok Permasalahan

Dari rangkaian fenomena diatas dapat diambil permasalahan yang menarik untuk dianalisa, yakni tentang hubungan yang terjadi dibalik transfer teknologi yang dilakukan oleh Jepang terhadap negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara. Memunculkan sebuah pertanyaan : *Apa dampak perdagangan teknologi Jepang terhadap perkembangan industri teknologi di Indonesia?*

C. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori sebagai suatu perangkat yang terintegrasi secara sintaksis, yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya, dengan data dasar sehingga dapat diamati.¹⁴ Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah.¹⁵

¹⁴ Glenn E. Snellbecker, Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hal 61.

Development of Underdevelopment Theory

Teori yang dikemukakan oleh Andre Gunder Frank: *Development of Underdevelopment Theory* (pembangunan keterbelakangan) dikelompokkan juga dalam teori-teori ketergantungan.¹⁶ Namun teori yang dikemukakan oleh Frank ini termasuk dalam teori yang mengkritik teori-teori struktural sebelumnya yang mengemukakan tentang hubungan yang saling ketergantungan antara—menurut istilah Frank—negara metropolis (pusat) dengan negara satelit (pinggiran) sebagai hubungan yang sejajar, dan tetap masih ada kemungkinan bagi Negara satelit untuk berkembang dalam kerangka ketergantungan itu.

Salah satu penggagas utama teori struktural seperti itu adalah Theotonio Dos Santos, yang melihat bahwa hubungan antara Negara pusat dan pinggiran adalah hubungan yang sejajar, dimana Negara pusat membutuhkan bahan mentah dari Negara pinggiran sebagai bahan baku industrinya. Sedangkan Negara pinggiran membutuhkan barang-barang industri dari Negara pusat, sehingga hubungan yang terjadi saling ketergantungan—hubungan resiprokal.¹⁷

Frank kemudian membantah dengan mengajukan argumen bahwa yang terjadi adalah hubungan yang tidak sejajar, hubungan yang ternyata hanya menguntungkan satu pihak saja, yaitu negara pusat. Yang terjadi adalah—melalui perusahaan multi nasional—pengerukan sumber daya alam di Negara pinggiran sebagai bahan baku industri di Negara pusat, yang terjadi adalah ketergantungan yang makin lama makin menggerogoti Negara pinggiran terhadap barang-barang substitusi impor. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, Negara industri maju berhasil menciptakan bahan-bahan sintetis yang kemudian mengganti bahan mentah yang sebelumnya diimpor dari Negara pinggiran. Akibatnya Negara pinggiran mulai kehilangan pasar untuk bahan mentahnya, sementara

mereka tetap dan masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap barang-barang impor dari Negara maju, sehingga yang terjadi adalah hubungan yang asimetris dan Negara pinggiran tetap tidak mengalami pembangunan, Frank kemudian menyebutnya sebagai *Development of Underdevelopment*.

Frank mengatakan bahwa keterbelakangan bukan suatu kondisi alamnya dari suatu masyarakat. Bukan juga karena masyarakat itu kekurangan modal. Keterbelakangan merupakan suatu proses ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi sebagai akibat globalisasi dari sistem kapitalisme.

Menurut Frank, dalam rangka mencari keuntungan yang sebesar-besarnya borjuasi di Negara-negara metropolis (dalam hal ini perusahaan multi nasional sebagai penguasa *capital flows and investment*) bekerja sama dengan pejabat pemerintah (yang korup) di Negara-negara satelit dan kaum borjuasi yang dominan disana (tuan tanah dan pedagang atau pengusaha lokal). Sebagai akibat dari kerja sama antara modal asing (perusahaan multi nasional melalui FDI/*Foreign Direct Investment*, portofolio, dan *joint ventures*) dengan pemerintah setempat ini, munculah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuasi lokal, dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak Negara tersebut.¹⁸

Di Indonesia, hal ini bisa dilihat pada masa orde baru, di mana *koncoisme* antara konglomerat, klan cendana dan investasi asing ditengarai menjadi salah satu penyebab krisis ekonomi di Indonesia, dan penyebab ketergantungan Indonesia terhadap bantuan (baca : hutang) luar negeri.

Kegiatan ekonomi praktis merupakan kegiatan ekonomi model asing yang berlokasi di Negara satelit. Fungsi kaum borjuasi lokal adalah sebagai payung politik serta memberi kemudahan bagi beroperasinya kepentingan modal asing tersebut, melalui

Ketiga sekarang mengalami penetrasi mendalam dan sangat tergantung pada negara-negara industri maju atau negara-negara pusat. Penetrasi itu terjadi melalui berbagai cara, ekonomi, politik, kultural, dan pada berbagai periode perkembangan suatu negara.

Penetrasi ekonomi bisa melalui cara finansial atau teknologis. Dalam tahap perkembangan ekonomi awal, cara paling umum adalah melalui penanaman modal langsung, yaitu perusahaan transnasional/multinasional (TNC's/MNC's) membentuk cabang-cabang yang terlibat dalam pertambangan, pertanian, pabrik mesin, dan perdagangan. Orang asing bisa juga menanam modal awal itu untuk menarik modal dari para investor lokal. Penetrasi politik dan kultural bisa berlangsung melalui paket-paket materiil atau simbolis, seperti buku, program televisi, koran, majalah, dan film. Atau berlangsung melalui orang "pembawa" kultur asing. Misalnya, para pemuda pulang dari belajar di negeri pusat bisa membawa unsur-unsur kultural industrial barat, seperti cara berpikir dan bertindak, ideologi, nilai dan pola konsumsi. Lembaga-lembaga pemerintah, swasta, maupun individu mengimpor produk politik dan budaya yang kemudian membentuk perilaku dalam pekerjaan dan dengan mendefinisikan tugas mereka itu. Produk seperti itu antara lain berupa peralatan komputer. Dengan semua sarana ini, nilai-nilai di negara pinggiran mengenai konsumsi dan produksi menjadi sangat ditentukan oleh penetrasi dari negara-negara pusat.

Dalam keadaan seperti ini, menggalakkan pembangunan dengan memperkuat borjuasi di negara-negara satelit merupakan usaha yang sia-sia, karena borjuasi tersebut merupakan borjuasi yang tergantung pada modal asing. Akumulasi modal yang terjadi akan diserap oleh kekuatan di dalam negeri itu sendiri. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara satelit hanya menguntungkan kepentingan modal asing dan kepentingan pribadi dari kaum borjuasi lokal. Keuntungan ini tidak akan

penetesan kebawah.¹⁷ Mengapa pembangunan tidak dilakukan tanpa hubungan dengan kekuatan asing? Secara teoritis, hal ini tentu saja bisa dilakukan. Tetapi dalam kenyataannya, usaha ini sangat sulit, karena pertumbuhan ekonomi negara tersebut secara makro (dalam bentuk kenaikan produksi nasionalnya) dan keuntungan kaum borjuasi lokal akan lebih mudah diperoleh kalau ekonomi negara tersebut dikaitkan dengan operasi modal asing melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Kalau tidak, mereka harus membangun kekuatan produksi sendiri yang membutuhkan modal besar dan teknologi canggih. Mereka juga harus berjuang keras untuk mendapatkan pangsa pasar bagi produk mereka di pasar dunia, pada saat pasar dunia sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multi nasional. Bila jalan ini yang ditempuh, kemungkinan berhasilnya sangat kecil.

Masyarakat di negara-negara satelit bukan lagi masyarakat feodal, karena kaum bangsawan yang ada sudah berproduksi untuk pasar dunia. Para bangsawan memang memperlakukan para petani dengan cara-cara feodal. Tetapi pada tingkat internasional, mereka sudah menjadi kelompok kapitalis. Mereka berproduksi untuk pasar dunia kapitalistis.

Sehubungan dengan elemen-elemen konstitutif dari ketergantungan dan pengaitannya ke proses keterbelakangan, secara umum dapat dibedakan dua posisi. Sebuah posisi sangat menekankan hal pengisapan dari sisi negara industri oleh perusahaan transnasional dengan dampak dekapitalisasi negara berkembang baik melalui perdagangan (jatuhnya *terms of trade* dalam versi marxis, pertukaran tidak seimbang) dan/atau melalui transfer keuntungan yang besar. Posisi lain memang melihat sapek pengisapan, tetapi lebih menyorot jalinan struktural ekonomi periferi dengan sentra dan pendirian ekonomi periferi dengan berorientasi pada kebutuhan sentra. Pada variasi

melihat pengisapan melalui perdagangan sebagai kendala pembangunan utama, ditekankan bahwa jatuhnya *terms of trade* dan pertukaran yang tidak seimbang di negara berkembang, memaksa untuk dilakukan lebih banyak ekspor agar dapat mempertahankan volume impor yang pernah diterima (pertumbuhan kemiskinan). Hal ini menuntut makin besarnya pengisapan tenaga kerja secara berlebihan, dengan penurunan daya beli yang berkaitan dengannya menimbulkan penyempitan pasar internal dan kesulitan pada industrialisasi substitusi impor yang telah dikenal. Pengisapan melalui perdagangan dihubungkan dengan ketidakberdayaan ekonomi periferi untuk melaksanakan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan penduduk

Dengan beberapa pengecualian, masalah negara dan kekuasaan politik di kapitalisme periferi dibahas sangat dangkal dalam literature-literatur *dependencia*. Struktur kelas dan situasi kekuasaan yang meliputinya dianggap sebagai hasil ketergantungan pembangunan kapitalistis, serta sebagai jaminan kelas penguasa dalam memeralat negara agar cocok untuk persyaratan operasionalisasi modal yang optimal akibat adanya identitas kepentingan dengan sektor eksternal dan kemudian muncul sebagai batu loncatan kepentingan modal metropol. Argumentasi mengenai negara dan kekuasaan demikian biasanya diturunkan dari premis-permis ekonomi. Analisis negara dan penelitian struktur-struktur kelas serta perubahannya, jarang dilakukan oleh penulis-penulis *dependencia*. Kekurangan ini terutama sekali dalam hal analisis negara, telah menimbulkan diskusi sengit "negara dalam Kapitalisme Periferi" (T. Evers, W. Hein, G. Simonis, R. Tetzlaff, B. Töpfer, dll.) di Jerman, Amerika Latin, dan AS mengenai Negara Otoriter-Birokratis (O'Donnel, Collier, dll.), yang hasilnya tidak saling menunjang, tetapi

D. Hipotesa

Dari penjabaran diatas maka penulis dapat mengambil sebuah hipotesa bahwa program transfer teknologi dan insutrialisasi yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia membawa dampak terhadap industri yaitu *“transfer teknologi dan industrialisasi yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia telah menciptakan ketergantungan teknologi Indonesia atas Jepang”*

F. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam politik teknologi di Dunia Ketiga khususnya di Indonesia, dan faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya politik teknologi di Dunia Ketiga serta dapat memberikan keismpulan terhadap permasalahan tersebut. Dengan memahami analisis yang ada dalam penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan berpikir mahasiswa mengenai intrik-intrik politik yang terjadi di Dunia Ketiga.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam melakukan pembahasan, objek yang dijadikan pembahasan yakni, alih teknologi dan perdagangan teknologi yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia dan dampak dari program alih teknologi yang terjadi di Indonesia.

H. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pembahasan ini adalah dengan menggunakan metode deskripsi analitis, dengan mengumpulkan bahan, menyusun, menginterpretasikan dan menganalisis data yang ada. Data-datanya sendiri diambil dari berbagai sumber seperti

yang bisa membantu dan relevan dengan pembahasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- a. Latar Belakang Masalah.
- b. Pokok Permasalahan.
- c. Kerangka Dasar Pemikiran.
- d. Hipotesa.
- e. Metode Pengumpulan Data.
- f. Jangkauan Penelitian.
- g. Sistematika Penulisan.

Bab II Politik Teknologi di Dunia Ketiga

- a. Penerapan Teknologi bagi Negara Dunia Ketiga
- b. WTO dalam Perdagangan Teknologi
- c. Peran TNC's dalam Politik Teknologi

Bab III Kepentingan Teknologi Jepang

- a. Posisi Jepang di kawasan Asia Tenggara.
- b. Kepentingan Teknologi Jepang di Indonesia
- c. Produk-produk Teknologi Jepang yang di pasarkan di Indonesia
- d. Kerjasama Indonesia—Jepang dalam EPA

Bab IV Pengaruh Perdagangan Teknologi Jepang di Indonesia

- a. Koncoisme dalam perdagangan Jepang-Indonesia
- b. Ketergantungan Teknologi Indonesia terhadap Jepang
- c. Dampak Perdagangan Teknologi Jepang terhadap Perekonomian Indonesia